

Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar Di SD Negeri Inpres Desa Kayuwatu Kecamatan Kakas Kabupaten Minahasa

Branden Lomban¹
Sarah Sambiran²
Welly Waworundeng³

Email Korespondensi: brandenlomban084@student.unsrat.ac.id

Abstrak

Adapun tujuan penelitian ini yaitu Untuk mengetahui tentang Program Kartu Indonesia Pintar di SD N INPRES Desa Kayuwatu Kec. Kakas Kab. Minahasa; Untuk memahami bagaimana Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar di SD N INPRES Desa Kayuwatu Kec. Kakas Kab. Minahasa dan Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah dalam pengimplementasian Program Kartu Indonesia Pintar Khususnya di SD NEGERI INPRES desa kayuwatu. Pendidikan merupakan kebutuhan bagi setiap insan untuk berkembang dan meningkatkan kemampuan diri. Pendidikan selalu dikaitkan dengan peluang pekerjaan yang pada zaman ini tidak sedikit lowongan pekerjaan menetapkan batasan minimal tingkat pendidikan. Program Indonesia Pintar yang ditetapkan oleh pemerintah dilaksanakan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), pada dasarnya masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui hal ini. Serta penyaluran yang masih tumpang tindih antara kelurahan dan sekolah formal maupun informal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Tujuan kebijakan Program Kartu Indonesia Pintar sudah membantu siswa dari keluarga miskin untuk memperoleh akses layanan pendidikan yang baik namun masih ada kendala dimana ketidakjelasan dari pembagian tugas yang melibatkan kesamaan tugas antar sekolah dan kelurahan. Walaupun begitu program ini tetap mendapat tanggapan positif oleh orang tua siswa karena mengurangi beban biaya disekolah.

Kata Kunci: Implementasi, Program, KIP

¹ *Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat*

² *Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat*

³ *Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat*

Sekretariat:

Gedung H6.2.2. Fispol Unsrat

Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado

EKSEKUTIF

Volume 3 No. 3 Tahun 2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

Pendahuluan

Program Indonesia Pintar yang ditetapkan oleh pemerintah dilaksanakan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), pada dasarnya masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui hal ini. Serta penyaluran yang masih tumpang tindih antara kelurahan dan sekolah formal maupun informal. Pendaftaran dan pendistribusian KIP sendiri masih simpang siur. Sosialisasi yang dilakukan masih belum maksimal. Hal ini sebabkan pada saat peluncuran fase pertama Kartu Indonesia Pintar pada bulan November 2014, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan mekanisme pendistribusian melalui kelurahan ataupun desa. Kelurahan/desa mendistribusikan KIP kepada keluarga penerima manfaat KIP. Dengan acuan data BPS, yang Masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa Program Indonesia Pintar Ini sama dengan BSM (Bantuan Siswa Miskin), yang sebenarnya memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan PIP melalui KIP yaitu, BSM hanya di tujukan pada pendidikan formal sedangkan KIP ditujukan pada sekolah formal maupun informal yang berusia 6-21 tahun. Melalui web resmi yaitu SIPINTAR (sistem informasi program indonesia pintar) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memperlihatkan hasil distribusi dari KIP dari tahun 2015-2016. Pada tahun 2016 ada 19.193.883 siswa yang mendapat KIP dan hanya 68,10% yang mendapatkan manfaat dari KIP. Dari angka tersebut dapat terlihat bahwa terdapat berbagai hambatan dalam pendistribusian KIP salah satunya data yang didapatkan dalam kriteria penerima manfaat KIP sendiri masih menjadi pertanyaan besar hingga saat ini. Hal itu tampak pada pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengusulkan adanya perubahan mekanisme penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP). Soalnya KIP yang sudah tersalur sekitar 60 persen selama ini menurutnya belum semua tepat sasaran. Jika selama ini disalurkan melalui desa-desa, ke depan Muhadjir ingin penyaluran 40 persen KIP yang belum tersalur akan langsung disalurkan ke sekolah-sekolah sesuai data

pokok pendidikan. Penyaluran KIP selama tidak tersalurkan dengan baik karena tidak menggunakan data terbaru. Data yang dipakai masih data Badan Pusat Statistik (BPS) 2011 dan diperbarui dari data 2012. Namun, tidak semuanya diperbarui sehingga tidak tepat sasaran.

Masalah administrasi masih saja menjadi kendala dalam pengimplementasian suatu kebijakan. Pada PIP sendiri sebagai penanda dan syarat untuk mendapatkan KIP maka orangtua ataupun keluarga anak harus terdaftar sebagai PKH (Program Keluarga Harapan) ataupun keluarga Pemegang KPS/KKS. Yang sering sekali data tidak tepat sasaran seperti pada Desa Kayuwatu Kecamatan Kakas Kabupaten Minahasa yang masih merujuk pada database di Bappenas hasil sensus sosial 2010 dan 2011 yang mengakibatkan banyaknya warga yang seharusnya mendapatkan manfaat dari KIP tidak menerima apapun karena ketidaktepatan data, data yang tidak update sehingga program KIP tidak tepat sasaran. belum lagi sosialisasi yang masih belum maksimal. Dengan kata lain Program ini dijalankan tidak diiringi dengan kesiapan sekolah dan kelurahan sebagai sumber data penerima manfaat dari PIP.

Defenisi Konsep

Konsep merupakan istilah dan defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat penelitian ilmu sosial. Melalui konsep kemudian peneliti diharapkan dapat menyederhanakan pemikirannya dengan menggunakan satu istilah untuk beberapa kejadian (events) yang berkaitan dengan yang lainnya. (Singarimbun, 1995:33)

Oleh karena itu untuk dapat menemukan batasan yang lebih jelas maka penulis dapat menyederhanakan pemikiran atas masalah yang sedang penulis teliti, maka penulis mengemukakan defenisi konsep sebagai berikut:

a) Implementasi Kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan

untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan.

- b) PIP adalah Program yang melakukan pemberian bantuan tunai kepada seluruh anak usia sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag). Yang direalisasikan melalui KIP (Kartu Indonesia Pintar).
- c) Implementasi Program Indonesia Pintar melalui KIP adalah tindakan dilakukan oleh pemerintah ataupun swasta dalam melaksanakan Program Indonesia Pintar melalui KIP yaitu Program yang melakukan pemberian bantuan tunai kepada seluruh anak usia sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag). Yang direalisasikan melalui KIP (Kartu Indonesia Pintar).

Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif. Untuk kepentingan identifikasi dan analisa dilaksanakan pengumpulan data dengan mengadakan penelitian di wilayah desa Kayuwatu kecamatan Kakas kabupaten Minahasa. Yang dimana terdapat salah satu sekolah yaitu SD N INPRES Kayuwatu yang menjadi fokus penelitian peneliti.

Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan dari program Kartu Indonesia Pintar di SD N INPRES Kayuwatu Desa Kayuwatu Kecamatan Kakas Kabupaten Minahasa sebagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat lewat jalur pendidikan

Teknik pengumpulan data adalah langkah terpenting dalam penelitian ini karena bertujuan mendapatkan data agar dapat di analisis. Menyangkut teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Teknik analisis data adalah proses menemukan dan menyusun data yang terkumpul, sehingga data tersebut dapat

disimpulkan dan digunakan sebagai bahan informasi yang dapat dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah:

1. Reduksi data
2. Penyajian data
3. Penarikan kesimpulan

Pembahasan

1. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi salah satu elemen penting dalam implementasi kebijakan untuk memudahkan kebijakan terlaksana dengan baik, yaitu rincian tugas dan prosedur pelaksanaan yang jelas. Karena rincian tugas dan prosedur yang telah disusun akan menjadi pedoman pelaksana kebijakan dalam menjalankan kebijakan, meski tidak dapat dipungkiri juga, terkadang pelaksana harus berimprovisasi ketika terjadi hal-hal yang di luar aturan.

Untuk pelaksanaan KIP telah diatur melalui juknis maupun juklak PIP dari Direktorat teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan setiap daerah hingga lembaga pendidikan. Dibalik kejelasan tersebut ada satu yang tidak dijelaskan yaitu tugas dari pemerintah daerah seperti kecamatan maupun desa. Apa yang menjadi hak dan wewenang desa dalam implementasi program KIP tidak dijelaskan. Karena yang diketahui desa adalah tugasnya sebagai pendistribusi KIP langsung ke tangan RTS. Itu mengakibatkan kebingungan di masyarakat begitu juga dengan pihak desa yang tidak begitu mengerti secara mendalam tugas dan wewenangnya.

Bagaimana implementor akan melaksanakan dan mensukseskan program sedangkan implementornya saja tidak mengetahui tugasnya dengan baik. Belum lagi adanya perubahan di dalam proses implementasi tetapi tidak segera di sosialisasikan. Karena program ini salah satu program prioritas dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo sehingga segala keputusan baik itu data dan prosedur langsung di kelolah oleh pemerintah pusat. Sebenarnya bentuk birokrasi yang ditawarkan pada program ini cukup sederhana, dimana pemerintah menggunakan data BPS untuk

mengidentifikasi masyarakat yang pantas menerima KIP dan kemudian diverifikasi untuk dicetak KIPnya, kemudian didistribusikan kepada RTS yang memiliki anak usia sekolah sesuai dengan data yang telah ditetapkan. Dan data tersebut jelas tampak pada KIP itu sendiri.

Penyempurnaan diarahkan untuk menghasilkan proses yang akuntabel dan transparan, serta mempunyai kinerja yang cepat dan ringkas. SOP atau juknis yang rinci dan dapat menggambarkan setiap jenis keluaran pekerjaan secara menyeluruh, melakukan analisis dan evaluasi jabatan untuk memperoleh gambaran rinci mengenai tugas yang dilakukan oleh setiap jabatan, serta melakukan analisis beban kerja untuk dapat memperoleh informasi mengenai waktu dan jumlah pejabat yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Dengan adanya standar prosedur operasi tersebut instansi pemerintah dapat memberikan layanan prima kepada publik, yaitu layanan yang terukur dan pasti dalam hal waktu penyelesaian, persyaratan administrasi yang harus dipenuhi, dan biaya yang harus dikeluarkan.

Struktur birokrasi yang tidak meribetkan, karena program KIP sendiri memiliki prinsip efektif dan efisien dalam pelaksanaannya. Dan hal ini akan meminimalisir kesalahan yang dibuat implementor dalam pelaksanaan tetapi tetap saja kejelasan tugas, hak dan wewenang pihak terkait haruslah dijelaskan dari awal pendataan, pendistribusian, hingga penyaluran dana. Sehingga tidak terjadi keterlambatan respon dari pihak terkait dalam melayani masyarakat. Kejelasan dan transparansi struktur birokrasi akan mendukung implementor melaksanakan apa yang menjadi tugasnya baik dari kelurahan Pekan Gebang maupun sekolah yang berada di kelurahan Pekan Gebang.

2. Komunikasi

Sebuah kebijakan hanya akan menjadi keputusan dan dokumen yang tidak penting jika tidak dikomunikasikan kepada pelaksana kebijakan dan penerima kebijakan. Sebelum sebuah kebijakan diimplementasikan, implementor kebijakan

harus mengetahui bahwa suatu keputusan dan perintah yang telah dibuat untuk melaksanakannya telah dikeluarkan, dan mereka telah mengetahui tugas dan wewenang masing-masing. Nah, dalam hal ini, komunikasi sangat berperan penting, yaitu mengkomunikasikan isi keputusan, dan juga apa yang harus dikerjakan oleh masing-masing implementor. Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi yang jelas, akurat, konsisten dan menyeluruh serta adanya koordinasi antara instansi-institusi terkait dalam proses implementasi, baik itu secara horizontal, vertical, ataupun diagonal.

Agar kebijakan dapat diimplementasikan dengan efektif, semua implementor sudah harus memahami secara keseluruhan isi kebijakan atau keputusan. Dalam implementasi program KIP di desa Kayuatu sudah berjalan sesuai dengan juklak maupun juknis yang ada, tetapi tugas dan wewenang pemerintah daerah terkait tidak dijelaskan sebagaimana mestinya. Dimana tugas kelurahan sebagai pendistribusi langsung kepada RTS tidaklah dijelaskan bagaimana mekanisme pendistribusian. Karena hal tersebut aparat kelurahan merasa bahwa ketika tugas yang diberikan secara berjenjang oleh kecamatan selesai maka tugas mereka selesai. Ketidjelasan dan ketidak konsisten dari mekanisme pendistribusian membuat masyarakat yang tidak mendapatkan KIP tetapi mendapatkan KPS maupun KKS ingin melapor tidak mengetahui harus melapor kepada pihak kelurahan ataukah sekolah.

Pada fakta dilapangan bahwa masyarakat memilih melapor ke desa karena desa lah yang mendistribusikan kartu tersebut, dan data sudah jelas terdapat di desa. Dan yang sebenarnya data penerima KIP sudah ada tetapi karena pembagiannya yang secara bertahap membuat masyarakat yang belum mendapatkan KIP berfikir bahwa program ini tidak merata. Data yang digunakan juga data dari BPS 2017, hal itu sangat disayangkan oleh desa karena tidak melibatkan desa dalam pendataan KIP karena desa lah yang mengetahui kondisi dari masyarakatnya secara langsung yang kemudian tidak adanya kericuhan ataupun

laporan yang terjadi dimasyarakat karena merasa tidak adil dalam pembagian KIP.

Informasi harus disampaikan secara gamblang oleh implementor kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya dalam program ini. Sekolah telah melakukan sosialisasi dengan baik kepada siswa penerima KIP maupun orang tua siswa penerima KIP dengan mengumpulkan orang tua dan memberitahukan secara lisan. Karena tugas desa yang hanya sebatas pendistribusi KIP maka tidak ada upaya sosialisasi yang dilakukan kelurahan, pemberitahuan hanya akan dilakukan kepada masyarakat yang langsung bertanya kepada aparatur kelurahan. Sosialisasi ataupun pemberitahuan tentang KIP juga dilakukan pihak lain seperti tim PKH Kecamatan Kakas dengan mengedukasi ibu-ibu PKH yang mendapatkan KIP untuk tidak menggunakan uang KIP untuk keperluan rumah tangga melainkan hanya untuk keperluan sekolah anak.

Komunikasi antar implementor sangat penting dimana akan terjalin koordinasi yang baik sehingga tidak terjadi tumpang tindih tugas. Hal ini terjadi di desa Kayuwatu sebagaimana seperti diketahui bahwa tugas pengusulan bukan penerima KIP yang tidak diketahui oleh masyarakat menjadikan desa menjadi tempat pengaduan masyarakat sedangkan hal tersebut merupakan tugas sekolah. tumpang tindih tugas tidak akan terjadi apabila program KIP di sampaikan dengan baik.

3. Sumber Daya

Selain komunikasi dan struktur birokrasi, sumber daya juga menjadi salah satu aspek yang penting dan tidak dapat terlepas dalam pelaksanaan kebijakan. Sumber daya akan mengatur bagaimana semua aktivitas berlangsung, baik itu sumber daya manusia, keuangan, hingga tersedianya sarana dan prasarana untuk menunjang seluruh aktivitas implementasi kebijakan. Sumber daya manusia harus memiliki kecakapan, kompeten dan jasmani yang memadai untuk menjalankan tanggung jawabnya. Kuantitas dari implementor yang mencukupi juga akan mempengaruhi

kebijakan itu berjalan. Bukan hanya itu, keuangan dan sarana dan prasarana. Keuangan harus cukup serta sarana dan prasarana penunjang harus cukup dengan kualitas yang baik. Dari penelitian yang telah dilakukan, sumber daya manusia sudah cukup memadai, baik dari kuantitas maupun latar belakang pendidikan. Dalam hal pendistribusian KIP di Desa Kayuwatu diserahkan kepada masing masing kepala lingkungan yang berjumlah 6 orang dan itu sudah cukup dan tepat sebab kepala lingkungan memiliki akses yang mudah untuk memberikan KIP langsung kepada RTS di lingkungannya. Sedangkan di sekolah masing masing terdapat 1 penanggung jawab KIP dan 1 operator yang menginput data langsung ke Dapodik. Dimana penanggung jawab ini berkoodinasi dengan guru lain untuk menginformasikan KIP dan mengumpulkan berkas, setelah berkas persyaratan pelaporan KIP terkumpul akan dilakukan penginputan yang dilakukan oleh operator yang dimasukkan kedalam data sekolah dengan merekap data tersebut dengan beberapa karakteristik yang menunjukkan identitas penerima KIP. Ketiga operator tersebut berlatar belakang pendidikan sarjana. Dimana salah satunya merupakan sarjana Teknik Informasi. Dan 2 operator lainnya merupakan sarjana pendidikan, walaupun begitu operator sangat menguasai komputerisasi dan mendalami tugasnya sebagai operator dengan melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga dalam penginputan dilakukan kehati-hatian dan ketelitian agar data yang diinput tidak terdapat kesalahan yang dapat merugikan siswa.

Jika melihat dari segi anggaran, dalam program KIP sendiri tidak ada anggaran yang dicairkan secara khusus untuk dalam sosialisasinya. Karena sosialisasi yang dilakukana sekolah dengan memanfaatkan momen, yaitu dengan cara mengumpulkan orang tua penerima KIP pada saat pembagian rapor siswa sehingga tidak mengeluarkan biaya yang cukup berarti. Hal ini tentu saja membuat program ini efisien dari segi anggaran. Dana manfaatpun tidak diberikan melalui tangan ke tangan melainkan melalui kerjasama dengan bank penyalur. Masyarakat

penerima manfaat langsung mendapatkan dana tersebut dengan membawa dokumen yang telah ditetapkan dalam juknis.

Untuk sarana dan prasaran pun hampir sama dengan anggaran dimana tidak ada keterkaitan yang cukup mempengaruhi program ini. dimana pendistribusian yang langsung diantar ke RTS dan pelaporan yang hanya melengkapi berkas yang diminta sekolah dan kartu yang cukup jelas memiliki identitas dari penerima manfaat di desa Kayuwatu.

4. Disposisi

Disposisi dalam implementasi kebijakan merupakan sikap implementor dalam mengimplementasikan kebijakan. Implementor sebagai subyek, maka sikap yang ia miliki sangat berpengaruh pada proses pelaksanaan kebijakan. Dalam model implementasi kebijakn oleh Edward III, teradapat dua hal pokok dalam disposisi implementor kebijakan, yakni bagaimana pengangkatan pegawai dan bagaimana meningkatkan dan mempertahankan semangat kerja pegawai.

Di desa Kayuwatu dalam hal pengangkatan pegawai dilakukan mengalokasikan pegawai yang diterima sesuai dengan bidang yang membutuhkan pegawai. Seperti di pada sekolah yang membutuhkan staf yang cakap dan menguasai komputerisasi sehingga diangkat tenaga honorer untuk mengisi jabatan operator tersebut. Dalam menjaga semangat kerja, pegawai menganggap bahwa menjadi bagian pegawai negeri maupun honorer adalah pilihan hidup dan merupakan bentuk pengabdian kepada negara. Menurut pegawai, bahwa insentif memang salah satu penyemangat kerja, namun tidak terlalu menentukan. Artinya, pegawai tetap semangat dalam bekerja, meski ada atau tidak ada insentif.

Penutup

Kesimpulan

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi salah satu elemen penting dalam implementasi kebijakan untuk memudahkan kebijakan terlaksana dengan baik, yaitu rincian tugas dan prosedur

pelaksanaan yang jelas. Karena rincian tugas dan prosedur yang telah disusun akan menjadi pedoman pelaksana kebijakan dalam menjalankan kebijakan, meski tidak dapat dipungkiri juga, terkadang pelaksana harus berimprovisasi ketika terjadi hal-hal yang di luar aturan.

Komunikasi

Sebuah kebijakan hanya akan menjadi keputusan dan dokumen yang tidak penting jika tidak dikomunikasikan kepada pelaksana kebijakan dan penerima kebijakan. Sebelum sebuah kebijakaan diimplementasikan, implementor kebijakan harus mengetahui bahwa suatu keputusan dan perintah yang telah dibuat untuk melaksanakannya telah dikeluarkan, dan mereka telah mengetahui tugas dan wewenang masing-masing.

Sumber Daya

Selain komunikasi dan struktur birokrasi, sumber daya juga menjadi salah satu aspek yang penting dan tidak dapat terlepas dalam pelaksanaan kebijakan. Sumber daya akan mengatur bagaimana semua aktivitas berlangsung, baik itu sumber daya manusia, keuangan, hingga tersedianya sarana dan prasarana untuk menunjang seluruh aktivitas implementasi kebijakan. Sumber daya manusia harus memiliki kecapakap, kompeten dan jasmani yang memadai untuk menjalankan tanggung jawabnya.

Disposisi

Disposisi dalam implementasi kebijakan merupakan sikap implementor dalam mengimplementasikan kebijakan. Implementor sebagai subyek, maka sikap yang ia miliki sangat berpengaruh pada proses pelaksanaan kebijakan. Dalam model implementasi kebijakn oleh Edward III, teradapat dua hal pokok dalam disposisi implementor kebijakan, yakni bagaimana pengangkatan pegawai dan bagaimana meningkatkan dan mempertahankan semangat kerja pegawai.

Saran

1. Perlu diadakannya sosialisasi lebih mendalam mengenai Program KIP seperti pengadaan sosialisasi kepada orangtua maupun pihak pelaksana mengenai program KIP supaya tidak terjadi kekeliruan dalam pelaksanaannya dan juga

EKSEKUTIF

Volume 3 No. 3 Tahun 2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

- supaya masyarakat lebih mengetahui apa itu Program KIP sendiri.
2. Perlu adanya pengawasan yang intens terhadap pelaksanaan Program KIP di Desa Kayuwatu seperti dari pihak pelaksana selalu memantau apakah program sudah dijalankan sebagaimana mestinya, yang harus terjun langsung kelapangan melihat apakah program sudah sesuai dengan tujuan awal yang sudah ditetapkan.
 3. Memberikan Kejelasan dalam Tupoksi antara sekolah dan desa.
 4. Perlunya adanya pengumuman melalui mading kelurahan atau penempelan brosur KIP kepada masyarakat yang tidak hanya melakukan penyebaran informasi melalui website resmi saja tetapi menyebarkan informasi dengan baik sehingga masyarakat mengetahui program ini dengan baik.
 5. Perlunya adanya pendalaman tentang Surat Keterangan Tidak Mampu dari kelurahan dimana surat ini tidak memiliki indikator dan syarat. Sehingga tidak terjadinya penyalahgunaan oleh masyarakat..

- Kependidikan, Jakarta: Rineka Cipta
- Irawan, Prasetya. 2005. Materi Pokok Penelitian Administrasi. Jakarta: Universitas Terbuka
- Moleong, Lexy. 2006. Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nugroho, Riant. 2003. Kebijakan Publik “Formulasi, Implementasi dan Evaluasi”. Jakarta: Gramedia
- Nugroho, Riant. 2008. Public Policy. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Subarsono, AG. 2005. Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif. Bandung: Alfabeta
- Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik. Yogyakarta: CAP

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab, Solichin. 1990. Analisis Kebijakan Negara. Jakarta: Rineka Cipta
- Abdul Wahab , Solichin. 2005. Analisis Kebijakan. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Abdul Wahab , Solichin. 2008. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang
- Abdullah, Syukur, 1988. Laporan Temu Kajian Posisi dan Peran Ilmu Administrasi Negara dan Manajemen. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia dan Asia Foundation
- Agustino, Leo. 2006. Politik dan Kebijakan Publik. Bandung: APII
- Agustino, Leo. 2007. Perihal Ilmu Politik. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Fuad dan Nugroho. 2012. Panduan Praktis Penelitian Kualitatif. Serang: Fisip Untirta Press.
- Ihsan, Fuad. 2011. Dasar-Dasar